

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2012
TANGGAL 4 FEBRUARI 2012
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2010-2014

MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG RELIGIUS, HARMONIS CERDAS, SEHAT, BERBUDAYA, DAN HARMONIS

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat serta Lingkungan Yang Sehat

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggungjawab (4)
1.	Meningkatnya pelayanan dasar kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau kepada masyarakat	1) Cakupan pelayanan pengobatan/ perawatan yang bermutu, merata dan terjangkau	Dinas Kesehatan
		2) Cakupan pelayanan kesehatan khusus	
		3) Cakupan pelayanan gawat darurat	
		4) Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang cukup, baik jenis maupun jumlah, serta bermutu dan terjangkau	
		5) Cakupan pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah	
		6) Cakupan pelayanan kesehatan lansia (pra usia lanjut dan usia lanjut)	
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	7) Menurunnya kasus penyakit menular, tidak menular, dan penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)	Dinas Kesehatan
		8) Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak	
		9) Meningkatnya pelayanan obstetrik dan neonatal emergency dasar dan komprehensif	
		10) Meningkatnya penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB dan Gizi Buruk	
		11) Meningkatnya status gizi masyarakat	
3.	Meningkatnya lingkungan sehat, perilaku sehat, dan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan	12) Meningkatnya perilaku sehat, lingkungan sehat, dan pemukiman sehat	Dinas Kesehatan
		13) Tingkat kemandirian masyarakat di bidang kesehatan	
		14) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Meningkatnya kualitas dan pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi pada kepuasan pelanggan	15) Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
		16) Cakupan pemenuhan standar minimal jenis-jenis pelayanan rumah sakit	
		17) Cakupan efisiensi pelayanan rumah sakit (BOR, TOI, BTO, MMR, FSR dan FODR)	
		18) Cakupan pemenuhan sarana dan prasana pelayanan sesuai standarisasi rumah sakit	

Tujuan 2 : Meningkatkan Pemerataan Pendidikan Yang Berkualitas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	19) Tersedianya pusat pendidikan yang murah dan modern untuk anak didik & anak putus sekolah	Dinas Pendidikan
		20) Tersedianya pusat pendidikan yang modern untuk masyarakat	
		21) Persentase peningkatan sarana dan prasarana untuk SD, SMP, dan SMA/SMK	
		22) Tersedianya bahan ajar dan buku-buku penunjang untuk SD, SMP dan SMA/SMK	
6.	Meningkatnya kualitas SDM di bidang pendidikan	23) Persentase tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dasar dan menengah	
7.	Meningkatnya pelayanan pendidikan terhadap masyarakat kurang mampu	24) Berkurangnya keluarga miskin yang tidak dapat menyekolahkan anaknya	
		25) Persentase anak-anak keluarga miskin putus sekolah yang ditangani	
8.	Meningkatnya pembinaan dan pelayanan mutu pendidikan baik formal, informal dan non formal	26) Peningkatan angka melanjutkan sekolah,	
		27) terutama SMP/MTs dan SMA/SMK	
		28) Berkurangnya angka mengulang dan angka putus sekolah di setiap jenjang pendidikan	
		29) Peningkatan mutu pendidikan PAUD dan TK	
		30) Peningkatan pemerataan mutu pendidikan tiap jenjang antar sekolah maupun antar kawasan (negeri dan swasta)	

(1)	(2)	(3)	(4)
		31) Meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah swasta	
		32) Peningkatan mutu SMA/SMK yang akan masuk ke pasar kerja	

Tujuan 3 : Meningkatkan Harkat dan Martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	33) Pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan (PMKS) lainnya.	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
		34) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	
		35) Peningkatan pembinaan anak terlantar/jalanan	
		36) Peningkatan para penyandang cacat dan trauma	
		37) Meningkatnya pelayanan bagi Lansia	
		38) Peningkatan pembinaan panti asuhan/Panti Jompo	
		39) Peningkatan pembinaan anak cacat dan stimulan	
		40) Meningkatnya pembinaan bagi orang gila terlantar	
		41) Meningkatnya pembinaan gelandang dan pengemis (Gepeng).	
		42) Peningkatan pembinaan Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi Sosial	

Tujuan 4 : Mewujudkan Sistem Pelayanan, Penanganan, dan Penggulangan Bencana Yang Berkualitas, Profesional dan Terpadu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Meningkatnya pelayanan, penanganan dan penanggulangan bencana yang berkualitas dan profesional	43) Cakupan NSPK urusan bidang Penanggulangan Bencana yang dapat diterapkan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		44) Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai SOP/ NSPK	
		45) Persentase jumlah personil yang terlatih dan terampil di bidang penanggulangan bencana.	

(1)	(2)	(3)	(4)
		46) Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanganan penanggulangan	

Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perpustakaan dan Minat Baca Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/arsip daerah	47) Persentase jumlah arsip yang diselamatkan dan dilestarikan	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
12.	Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan	48) Persentase pemenuhan pelayanan informasi perpustakaan	
13.	Meningkatnya publikasi dan minat baca masyarakat	49) Jumlah peningkatan kunjungan dan minat baca masyarakat	

WALIKOTA PONTIANAK,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2012
TANGGAL 4 FEBRUARI 2012
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2010-2014

MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMUDA

Tujuan 6 : Mewujudkan Keluarga Berkualitas Yang Berkeadilan dan Berkesetaraan Gender

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	50) Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 51) Menurunnya kasus korban KDRT dan Trafficking 52) Meningkatnya kemandirian perempuan dan anak	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB
15.	Terwujudnya keluarga berkualitas melalui keluarga berencana dan keluarga sejahtera	53) Meningkatnya keluarga kecil bahagia sejahtera 54) Meningkatnya kualitas hidup keluarga sejahtera	

Tujuan 7 : Meningkatkan Peran Generasi Muda serta Olahraga Yang Sehat, Cerdas dan Berprestasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Meningkatnya produktivitas dan kreativitas pemuda yang mandiri sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan daerah	55) Meningkatnya jumlah pemuda yang kreatif dan berprestasi 56) Meningkatnya jumlah pemuda yang terampil di bidang kewirausahaan 57) Meningkatnya kinerja organisasi dan kelompok kepemudaan dalam pembangunan daerah	Dinas Pemuda dan Olahraga
17.	Meningkatnya sistem pembinaan manajemen dan pengembangan prestasi di bidang keolahragaan yang terpadu dan berkelanjutan	58) Tersedianya Regulasi Daerah di bidang peningkatan dan pengembangan mutu dan tenaga keolahragaan 59) Meningkatnya jumlah atlet yang berprestasi	
18.	Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang di bidang pengembangan keolahragaan	60) Terbangunnya sarana dan prasarana olahraga yang memadai di Kota Pontianak	

WALIKOTA PONTIANAK,



SUTARMIDJI

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2012
TANGGAL 4 FEBRUARI 2012
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2010-2014**

MISI 3 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG LEBIH MERATA DAN MENGURANGI PENGANGGURAN

Tujuan 8 : Mewujudkan Kemandirian Sektor Perdagangan, Industri, Koperasi, dan UKM yang Mempunyai Daya Saing Tinggi

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggungjawab (4)
19.	Meningkatnya penguasaan teknologi dan kendali mutu industri kecil dan menengah	61) Berkembangnya komoditi lokal yang potensial 62) Berkembangnya UKM melalui penyederhanaan transparansi kebijakan dan penerapan teknologi informasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
20.	Terciptanya iklim usaha perdagangan yang kondusif	63) Terwujudnya kenyamanan bertransaksi di pasar, menyangkut keselamatan, kesehatan dan keamanan pedagang dan pembeli 64) Meningkatnya kemitraan, akses sumber daya pasar dan kewenangan usaha bagi UMKM	
21.	Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi	65) Berkembangnya gerakan koperasi menjadi salah satu pelaku ekonomi yang berperan dalam peningkatan ekonomi lokal	
22.	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan UMKM yang tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan sarana penunjang UMKM	66) Berkembangnya UMKM menjadi usaha yang berhasil guna dan produktif dengan kualitas produk yang bersaing 67) Meningkatnya daya saing UMKM secara berkelanjutan di pasar lokal, nasional dan global melalui akses dan penetrasi pasar	

Tujuan 9 : Meningkatkan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Kehutanan Yang Berwawasan Lingkungan

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggungjawab (4)
23.	Meningkatnya produksi pertanian	68) Meningkatnya produksi tanaman hortikultura (kg/ha) 69) Volume hasil daging (kg/bulan)	Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

(1)	(2)	(3)	(4)
24.	Meningkatnya produksi perikanan	70) Volume produksi perikanan hasil tangkap (ton)	
		71) Volume produksi perikanan hasil budidaya (ton/ha)	
25.	Berkembangnya sistem pengelolaan sektor kehutanan	72) Luas areal hutan kota di wilayah Kota Pontianak	

Tujuan 10 : Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Di Bidang Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
26.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	73) Persentase peningkatan pemenuhan ketersediaan pangan	Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
		74) Persentase peningkatan skor pola pangan harapan (PPH)	
		75) Persentase peningkatan mutu dan keamanan pangan	
		76) Tingkat ketersediaan informasi pasokan, akses dan stabilitas harga pangan	
27.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	77) Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita	
		78) Persentase penguatan cadangan pangan daerah	
		79) Jumlah penanganan daerah rawan pangan	
28.	Meningkatnya kualitas SDM yang bergerak di bidang pangan	80) Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	
		81) Persentase peningkatan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan	

Tujuan 11 : Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Daerah Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
29.	Meningkatnya pertumbuhan penerimaan daerah	82) Meningkatkan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak daerah	Dinas Pendapatan Daerah
		83) Meningkatkan pertumbuhan realisasi penerimaan PBB sektor perkotaan	
30.	Meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah	84) Meningkatkan jumlah realisasi pajak daerah	
		85) Meningkatkan jumlah realisasi PBB sektor perkotaan	
		86) Meningkatkan pendapatan retribusi kebersihan	

(1)	(2)	(3)	(4)
		87) Meningkatnya kontribusi PAD dari pelayanan administrasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Meningkatnya kontribusi retribusi perizinan terhadap PAD	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)
31.	Meningkatnya target dan realisasi investasi	88) Meningkatnya realisasi investasi PMDN/PMA/Swasta Nasional	

Tujuan 12 : Meningkatkan Kemandirian dan Keberdayaan Masyarakat Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggungjawab (4)
32.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan	89) Persentase swadaya murni masyarakat dalam pembangunan meningkat 90) Persentase profil Kecamatan dan Kelurahan yang memiliki data base aktual dan komprehensif 91) Persentase partisipasi aktif LSM/LPM dalam pembangunan kelurahan 92) Jumlah kelompok lembaga lansia aktif meningkat	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Anak dan KB
33.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) dalam pengembangan ekonomi masyarakat	93) Persentase jumlah usaha ekonomi mikro yang menerapkan TTG 94) Persentase tumbuhnya inovasi TTG dalam setiap lomba cipta karya dan pagelaran TTG	
34.	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat tidak mampu	95) Persentase usaha mikro dan <i>home industry</i> yang memiliki keterampilan	

Tujuan 13 : Berkurangnya Angka Pengangguran Melalui Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta Perluasan Kesempatan Kerja

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggungjawab (4)
35.	Berkurangnya angka pengangguran	96) Persentase pertumbuhan angkatan kerja 97) Persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas 98) Persentase pencari kerja yang terserap di berbagai lapangan usaha industri, jasa, perdagangan, pertanian, dan kerajinan rumah tangga 99) Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan di bidang kewirausahaan	Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan hukum terhadap perselisihan hubungan industrial	100) Meningkatnya jumlah kasus perselisihan tenaga kerja yang dapat diselesaikan	
		101) Tersedianya kebijakan di bidang kesejahteraan pekerja/buruh (UMR dan program Jamsostek)	

Tujuan 14 : Meningkatkan Peran Pariwisata dan Pelestarian serta Pengembangan Nilai-Nilai Kebudayaan Daerah Untuk Menunjang Perekonomian Daerah

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggungjawab (4)
37.	Meningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah	102) Persentase meningkatnya partisipasi dan apresiasi masyarakat akan pagelaran seni dan budaya daerah	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		103) Jumlah karya budaya yang diaktualisasikan kembali oleh masyarakat	
		104) Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	
38.	Meningkatnya kualitas pariwisata dengan memanfaatkan potensi daerah	105) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik	
		106) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan manca negara	

WALIKOTA PONTIANAK,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2012
TANGGAL 4 FEBRUARI 2012
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2010-2014

MISI 4 : MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UNTUK Mendukung Terciptanya IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF

Tujuan 15 : Terwujudnya Masyarakat Yang Aman, Tertib, Harmonis dan Demokratis Dalam Mendukung Terciptanya Situasi dan Kondisi Yang Kondusif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
39.	Meningkatnya partisipasi anggota masyarakat, umat beragama dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan daerah.	107) Persentase tingkat partisipasi/aktivitas anggota masyarakat, tokoh agama dan ormas dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis	Kantor Kesatuan Bangsa dan Sosial Politik
40.	Meningkatnya kehidupan politik yang demokratis untuk membangun bangsa dan daerah.	108) Persentase meningkatnya tertib administrasi partai politik 109) Persentase meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu	

Tujuan 16 : Meningkatkan Kepatuhan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Demi Terciptanya Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
41.	Meningkatnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	110) Persentase menurunnya pelanggaran masyarakat terhadap ketentuan PERDA	Satuan Polisi Pamong Praja
42.	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam perlindungan masyarakat	111) Persentase aktivitas warga dan anggota Satuan LINMAS dalam memelihara stabilitas sosial, politik, ekonomi dan budaya. 112) Persentase peranserta anggota Satuan LINMAS memberikan perlindungan kepada masyarakat	
43.	Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketenteraman dan kedamaian bermasyarakat	113) Peningkatan intensitas upaya pengamanan dan pencegahan tindakan kriminal oleh anggota Satpol PP 114) Menurunnya intensitas kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	

WALIKOTA PONTIANAK,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2012
TANGGAL 4 FEBRUARI 2012
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2010-2014

MISI 5 : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN UNTUK MENUNJANG PERKEMBANGAN PERDAGANGAN DAN JASA

Tujuan 17 : Meningkatkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Yang Memadai Untuk Mendukung Kelancaran Transportasi Dalam Aktivitas Perdagangan dan Jasa

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	
44.	Meningkatnya penyediaan prasarana jalan dan jembatan yang representatif dan berwawasan lingkungan secara berkesinambungan	115) Persentase peningkatan rasio jalan dengan kondisi baik	Dinas Pekerjaan Umum	
		116) Persentase peningkatan rasio jembatan dengan kondisi baik		
45.	Meningkatnya penyediaan, pemeliharaan dan pengendalian sarana prasarana sumber daya air dan berwawasan lingkungan	117) Persentase peningkatan kawasan yang bebas genangan		
		118) Rasio penduduk yang terlayani air bersih		
46.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman serta bangunan pemerintah	119) Persentase peningkatan rasio jalan lingkungan dalam kondisi baik		Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan
		120) Peningkatan pemenuhan sanitasi lingkungan perumahan dan permukiman		
		121) Jumlah bangunan pemerintah sesuai standard teknis		

Tujuan 18 : Mewujudkan Transportasi Kota Yang Disiplin, Tertib, Aman, dan Lancar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
47.	Meningkatnya pelayanan angkutan, lalu lintas darat, sungai dan perparkiran	122) Persentase peningkatan kelancaran operasional pelayanan angkutan, lalu lintas darat, sungai dan perparkiran	Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
		123) Persentase jumlah layanan pengujian kendaraan bermotor (KIR)	
		124) Peningkatan ketertiban perparkiran di pusat perdagangan dan jasa	
48.	Meningkatnya penataan sarana dan prasarana angkutan, lalu lintas darat, sungai dan perparkiran	125) Terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu lintas darat dan sungai (traffic light, marka, zebra cross, rambu-rambu lalu lintas lainnya) 126) Terpeliharanya kondisi terminal dan halte dengan baik	

(1)	(2)	(3)	(4)
		127) Berfungsinya dermaga sungai dan pelabuhan penyeberangan	
		128) Peningkatan keberfungsian <i>traffic light</i> dan rambu-rambu lalu lintas	

Tujuan 19 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Kota

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
49.	Meningkatnya pengelolaan dan operasional kebersihan dan pertamanan	129) Jumlah sampah yang dapat diangkut dengan sistem swakelola dari TPS ke TPA	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		130) Jumlah pengelolaan sampah dengan sistem swakelola di TPA	
		131) Peningkatan pelaksanaan operasional instalasi pengolahan limbah tinja (IPLT)	
		132) Rata-rata jumlah lindi (limbah cair sampah) yang diproses	
		133) Jumlah ruas pasar dan ruas jalan kota yang dilakukan penyapuan/ dibersihkan	
		134) Rata-rata jumlah bahu dan median jalan yang ditebas	
		135) Persentase jumlah sampah yang diangkut pada hari-hari besar	
		136) Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) dalam kondisi baik	
		137) Jumlah angkutan truck sampah yang terpelihara dalam kondisi siap pakai	
		138) Jumlah kontainer sampah dalam kondisi baik	
50.	Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	139) Terpenuhinya ketersediaan prasarana dan sarana persampahan (sepeda motor roda tiga, gerobak sampah, dan boldozer)	
		140) Terpenuhinya ketersediaan peralatan perbengkelan sarana angkutan dan pengelolaan persampahan	
50.	Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	141) Meningkatnya pengadaan bibit taman hias dan peneduh	
		142) Rata-rata jumlah pohon yang dipangkat (<i>control vegetasi</i>)	

WALIKOTA PONTIANAK,



SUTARMIDJI

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2012
TANGGAL 4 FEBRUARI 2012
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2010-2014

MISI 6 : MEWUJUDKAN TATA RUANG, TATA KOTA DAN WILAYAH YANG SEIMBANG SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan 20 : Mewujudkan Penataan Ruang Yang Akomodatif, Tertib, Teratur dan Berwawasan Lingkungan

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggungjawab (4)
51.	Meningkatnya tata ruang kota yang tepat dan berwawasan lingkungan	143) Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak huni	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Perumahan
		144) Persentase menurunnya lingkungan perumahan (bangunan) yang kumuh	
52.	Meningkatnya pengendalian pembangunan perumahan sesuai tata ruang kota	145) Persentase menurunnya tingkat pelanggaran pelaksanaan dan pembangunan perumahan	
53.	Meningkatnya pelayanan perizinan dan pelaporan penggunaan bangunan	146) Proporsi jumlah bangunan yang sudah berizin (IMB), dalam proses perizinan, dan belum berizin.	

Tujuan 21 : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Kota Pontianak Yang Hijau dan Teduh

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja Utama (3)	Penanggungjawab (4)
54.	Meningkatnya akuntabilitas dan aksesabilitas dalam pelayanan dan penyediaan data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) yang komprehensif.	147) Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	Badan Lingkungan Hidup
		148) Persentase keakuratan dan informasi SLHD yang tercantum dalam dokumen UKL/ UPL	
		149) Jumlah penyuluhan/ sosialisasi lingkungan hidup kepada masyarakat dan pelaku usaha.	
55.	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	150) Persentase menurunnya kualitas pencemaran sesuai Standar Baku Mutu	
		151) Persentase menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis	

WALIKOTA PONTIANAK,


SUTARMIDJI

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2012
TANGGAL 4 FEBRUARI 2012
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2010-2014

MISI 7 : MENINGKATKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN KETAATAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Tujuan 22 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Administrasi Keuangan Yang Efektif

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
56.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan	152) Meningkatkan keakuratan data dan informasi kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		153) Meningkatkan produktivitas pelayanan administrasi kependudukan	
57.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan administrasi pemerintahan daerah	154) Penyampaian LPPD tepat waktu	Sekretariat Daerah
		155) Penyampaian LAKIP dan TAPKIN Kota Pontianak tepat waktu	
		156) Jumlah produk hukum daerah yang diproses dan ditetapkan (Perda, Perwa, dan Kepwa) sesuai Program Legislasi Daerah (Prolegda).	
		157) Jumlah laporan pelaksanaan tugas pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku	
		158) Jumlah kasus pertanahan yang dapat diselesaikan	
		159) Jumlah kerjasama antar pemerintah kota yang difasilitasi/diikuti	
		160) Persentase data rupabumi yang teridentifikasi dan terinventarisasi	
58.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja organisasi perangkat daerah	161) Jumlah SKPD yang dibentuk berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
		162) Jumlah SKPD yang melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	
		163) Jumlah SKPD yang memenuhi dan menerapkan standar pelayanan publik (IKM, SOP, Budaya Kerja, SPM)	
		164) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Publik Pemda dalam kategori "Baik"	

(1)	(2)	(3)	(4)
		165) Persentase jumlah SKPD yang telah memenuhi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	
59.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan intern satuan kerja perangkat daerah	166) Jumlah Laporan SPIP dalam kategori "Baik" 167) Persentase Kinerja SKPD hasil evaluasi AKIP yang masuk kategori "Baik" 168) Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Inspektorat
60.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan satuan kerja perangkat daerah	169) Persentase Laporan Keuangan SKPD disampaikan tepat waktu 170) Persentase berkurangnya SKPD kerugian negara hasil pemeriksaan 171) Persentase jumlah uang dapat dikembalikan kepada negara/daerah 172) Persentase berkurangnya jumlah temuan	

Tujuan 23 : Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Terselenggaranya Tri Fungsi DPRD Kota Pontianak

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
61.	Meningkatnya kelancaran penyelesaian tugas-tugas DPRD	173) Persentase terlaksananya agenda kedewanan sesuai ketetapan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
62.	Meningkatnya wawasan dan aktivitas anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedewanan	174) Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti ke dalam Perda Inisiatif DPRD dan Keputusan DPRD	
63.	Meningkatnya pelayanan sistem informasi dan publikasi kedewanan	175) Jumlah dan jenis informasi dan publikasi kedewanan yang disampaikan kepada masyarakat	

Tujuan 24 : Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat dan Kehidupan Bermasyarakat dan Beragama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
64.	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan beragama	176) Jumlah masyarakat miskin yang berhak mendapatkan Jamkesmas dan Jamkesko 177) Jumlah rumah ibadah di Kota Pontianak yang mendapatkan bantuan sosial 178) Jumlah guru ngaji di Kota Pontianak yang mendapatkan bantuan sosial	Sekretariat Daerah

(1)	(2)	(3)	(4)
		179) Jumlah petugas fardhu kifayah yang terampil dalam melaksanakan tugasnya	
		180) Persentase jumlah rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) “Beras Raskin” (Raskin)	
65.	Meningkatnya kualitas administrasi dan evaluasi kebijakan pengembangan BUMD dan perekonomian daerah	181) Jumlah BUMD yang masuk kategori sehat	
		182) Jumlah kontribusi terhadap PAD yang diperoleh dari BUMD yang <i>profitable</i>	
		183) Jumlah dan jenis regulasi/rekomendasi di bidang evaluasi dan pengendalian pembangunan fisik dan prasarana yang diselesaikan	

Tujuan 25 : Meningkatnya Keterbukaan dan Transparansi Informasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
66.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehumasan dan transparansi informasi pemerintahan daerah	184) Jumlah penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat	Sekretariat Daerah
		185) Jumlah aspirasi /klaim masyarakat yang ditindaklanjuti Pemerintah Daerah	
67.	Meningkatnya pelayanan dan akses informasi, komunikasi dan informatika	186) Jumlah SKPD yang mengembangkan dan memutakhirkan informasi melalui jasa jaringan internet/website secara berkala	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		187) Jenis dan media informasi pemerintah yang dapat diakses dan disampaikan melalui media cetak dan media elektronik	
		188) Jumlah pelanggaran ijinusaha bidang komunikasi dan informatika	
		189) Persentase jumlah pengadaan barang dan jasa yang diproses melalui layanan secara elektronik (LPSE)	
68.	Meningkatnya kualitas dan transparansi dalam sistem pelayanan perizinan terpadu	190) IKM terhadap pelayanan perizinan terpadu	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T)
		191) Persentase permohonan izin yang diterbitkan izin	
		192) Persentase jenis pelayanan perizinan sesuai SOP	
		193) Persentase kasus pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	

Tujuan 26 : Meningkatnya Efisiensi Pengelolaan Keuangan dan Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
69.	Terwujudnya penyusunan dan penyampaian dokumen APBD tepat waktu dan akurat	194) Tingkat ketepatan waktu dan kesesuaian penyusunan RKA/DPA SKPD dengan KUA/PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		195) Tingkat akurasi data dalam penyajian laporan prognosis dan visualisasi laporan keuangan daerah	
70.	Terwujudnya efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan daerah	196) Persentase pelaksanaan registrasi SP2D dan penerimaan SPJ	
		197) Tingkat pemenuhan pertanggungjawaban penggunaan dana tepat waktu	
71.	Terwujudnya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	198) Persentase SKPD yang menyampaikan SPJ tepat waktu dan akuntabel	
		199) Persentase pelaporan keuangan Pemda dan SKPD memenuhi SAP	
72.	Terwujudnya validasi sistem pengelolaan aset daerah	200) Persentase aset tanah milik Pemda yang bersertifikat	
		201) Persentase barang milik daerah yang terinventarisir dalam sistem informasi penataan aset daerah (SIMBADA dan SIMA)	
73.	Meningkatnya pelayanan dan akses informasi, komunikasi dan informatika	202) Jumlah SKPD yang mengembangkan dan memutakhirkan informasi melalui jasa jaringan internet/ website secara berkala	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
		203) Jenis dan media informasi pemerintahan yang dapat diakses dan disampaikan melalui media cetak dan media elektronik	
		204) Jumlah pelanggaran ijin usaha bidang komunikasi dan informatika	

Tujuan 27 : Mewujudkan Sumber Daya Aparatur Yang Berkualitas dan Professional Menuju Pelayanan Kepegawaian Yang Baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
74.	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah daerah.	205) Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas, Penyesuaian Ijasah, dan Ujian Sertifikasi.	Badan Kepegawaian Daerah
		206) Persentase jumlah PNS yang mengikuti pendidikan penjenjangan.	
		207) Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Formal dan Bimtek PNS.	

(1)	(2)	(3)	(4)
		208) Persentase data PNS yang terhimpun dalam database kepegawaian (Sistem Aplikasi Program Kepegawaian/SAPK) dan Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian (SIMPEG).	
75.	Meningkatnya pembinaan disiplin aparatur dengan aplikasi prinsip <i>reward and punishment</i> .	209) Jumlah penyelesaian administrasi penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin kepegawaian.	
		210) Jumlah penyelesaian administrasi kepegawaian (KARIS/ KARSU/ KARPEG) dan penyelenggaraan sumpah PNS	
		211) Jumlah PNS yang menerima penghargaan dan reward	
76.	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai mekanisme dan prosedur serta perundang-undangan yang berlaku.	212) Jumlah data pegawai pensiun dan kenaikan pangkat yang diproses tepat waktu	
		213) Jumlah PNS yang menduduki jabatan struktural, fungsional	
		214) Persentase ketepatan waktu penyelesaian proses kenaikan pangkat PNS dan SK CPNS menjadi PNS	

Tujuan 28 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Terarah, Terukur, Terpadu dan Handal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
77.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang valid dan akuntabel	215) Persentase sumber daya ekonomi daerah yang teridentifikasi dalam dokumen perencanaan ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		216) Tersedianya dokumen Kebijakan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)	
		217) Tersedianya dokumen database pembangunan bidang ekonomi yang valid dan aktual	
		218) Persentase peningkatan perencanaan hasil musrenbang bidang ekonomi yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah dan nasional	
78.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan sosial dan budaya daerah	219) Persentase peningkatan masyarakat miskin yang mendapat akses pelayanan pendidikan yang layak	

(1)	(2)	(3)	(4)
		220) Persentase peningkatan masyarakat miskin yang mendapat akses pelayanan kesehatan 221) Tersedianya dokumen database pembangunan bidang sosial budaya yang valid dan aktual 222) Persentase peningkatan perencanaan hasil musrenbang bidang sosial budaya yang terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah dan nasional	
79.	Meningkatnya keterpaduan pengembangan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang, dan perumahan yang berwawasan lingkungan	223) Tingkat kesesuaian penataan ruang dan perumahan dengan RTRW Kota Pontianak 2010-2030 224) Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi terdistribusi ke masyarakat 225) Tersedianya dokumen database pembangunan bidang fisik prasarana yang valid dan aktual 226) Persentase peningkatan perencanaan hasil Musrenbang bidang fisik prasaana yang terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah dan nasional 227) Persentase peningkatan perencanaan hasil musrenbang bidang fisik prasarana yang terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah dan nasional	
80.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan kinerja, evaluasi, dan pelaporan pemerintahan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	228) Tingkat ketepatan waktu dan kecepatan penyelesaian penyusunan dokumen RKPD, RKT, dan LKPj 229) Persentase penyajian gambaran kinerja pemerintahan dan hasil pembangunan 230) Persentase updating data base dan pelaporan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana.	
81.	Meningkatnya kualitas dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi, sosial budaya, dan fisik prasarana yang komprehensif dan aktual	231) Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 232) Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang sosial budaya	

(1)	(2)	(3)	(4)
		233) Tersedianya dokumen penelitian dan pengembangan bidang fisik prasarana	

Tujuan 29 : Terselenggaranya Tugas Umum Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)
82.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat	234) Persentase capaian IKM terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan	Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
83.	Meningkatnya kesadaran hukum dan keamanan dan ketertiban masyarakat	235) Persentase berkurangnya pelanggaran hukum dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	
84.	Meningkatnya koordinasi pembangunan kecamatan dengan masyarakat	236) Persentase permasalahan pembangunan kecamatan/ kelurahan terkoordinasi melalui Musrenbang	
85.	Meningkatnya penguatan lembaga sosial dan ekonomi masyarakat	237) Jumlah lembaga sosial dan lembaga ekonomi masyarakat yang berfungsi efektif	
86.	Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan	238) Persentase partisipasi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan kecamatan dan kelurahan.	

WALIKOTA PONTIANAK,



SUTARMIDJI